

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

## LAPORAN SINGKAT KOMISI II DPR RI

# (BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)

Tahun Sidang

: 2021-2022

Masa Persidangan : V

Rapat Ke-

: 13

Jenis Rapat

: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat

Sifat Rapat

: Terbuka

Hari/Tanggal

: Selasa, 7 Juni 2022

Waktu

: Pukul 15.00 WIB s.d Selesai

Tempat

: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta

Acara

: Membicarakan Rancangan Peraturan KPU

Ketua Rapat

: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II

DPR RI

Sekretaris Rapat

Hadir

: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI

: A. 37 (tiga puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI dari 47 (empat puluh tujuh) Anggota Komisi II

DPR RI

B. Menteri Dalam Negeri

C. Ketua KPU

D. Ketua Bawaslu

E. Ketua DKPP

## I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda membicarakan Rancangan Peraturan KPU, hari Selasa, 7 Juni 2022, dibuka pukul 17.10 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

# II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda membicarakan Rancangan Peraturan KPU, sebagai berikut:

1. Ketua KPU menyampaikan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.

- 2. Mengingat masa kampanye (75 hari) beririsan dengan produksi, distribusi dan pengelolaan (sortir, lipat, setting, packing) logistik (surat suara, formulir, Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Alat Bantu Coblos Tuna Netra/ABCTN), maka dibutuhkan dukungan dari DPR, Pemerintah, MA, Bawaslu dan Peserta Pemilu dalam rangka upaya percepatan pemenuhan logistik Pemilu berupa:
  - a. Payung Hukum Khusus untuk Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu
  - b. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
  - c. Validasi Surat Suara
  - d. Penanganan Logistik Pemilu di Luar Negeri
  - e. Distribusi dan Pengelolaan Logistik

#### III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda membicarakan Rancangan Peraturan KPU, sebagai berikut:

- Dalam Negeri menyetujui 1. Komisi II DPR RI bersama Menteri rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 2. Demi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2024, Komisi II DPR RI meminta Pemerintah untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 termasuk menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang pengadaan barang/jasa khusus Pemilu; juga kegiatan kelancaran pendistribusian logistik Pemilu 2024.

## IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 20.16 WIB.

Jakarta, 7 Juni 2022 KETUA RAPAT

H. AHMAD DOLI KURNIA TANDUUNGAL

A-270